

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka Berbagai Tahun Terbitan. .
- Dinas Pendapatan Daerah. Arsip Evaluasi Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Berbagai Tahun Terbitan. Kabupaten Pesisir Selatan.
- <http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak/index.php/layanan-diklat/seputar-diklat/1345-peran-pusdiklat-pajak-dalam-proses-pengalihan-pbb-p2>
- Maharani S. 2011. Pengaruh Realisasi Belanja Daerah dan Angkatan Kerja terhadap Output dan Pendapatan Perkapita (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah). Semarang: Unuversitas Diponegoro.
- Paddu, Hamid, dkk. 2012. Analisis Dampak Pengalihan BPHTB Ke Daerah Terhadap Kondisi Fiskal Daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Rahdina, D. P. 2008. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Depok Pada Era Otonomi Daerah [TESIS]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Rahmawati, Rina. 2009. Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sumedang. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.
- Setyawan, Haris. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Kelurahan Pulorejo). Jawa Timur: Universitas Pembangunan Nasional Vetran.
- Sinaga, B. M. dan H. Siregar. 2005. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia. Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Suharno. 2003. Potret Perjalanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Jakarta.
- Tjahyono, Ahmad dan M. Fikri Husein. 2000. Perpajakan. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Wahyuni, Dian. 2010. Persiapan Pemerintah Menghadapi Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus jabodetabek). Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Waluyo dan Wirawan. 2000. "Perpajakan Indonesia". Jakarta: Salemba Empat, Edisi ke-4.
- \_\_\_\_\_. 2000. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan.

\_\_\_\_\_. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

\_\_\_\_\_. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

\_\_\_\_\_. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

\_\_\_\_\_. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

\_\_\_\_\_. 2012. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan.

